



Moratorium Pembangunan Hotel Diperpanjang

17 Izin dari 104 yang Diajukan Belum Dikeluarkan

JOGJA - Penghentian sementara atau moratorium penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Kota Jogja diperpanjang. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) menyatakan, meskipun begitu, bukan berarti selama perpanjangan moratorium ini tidak ada lagi pendirian hotel baru di Kota Jogja.

HS mengatakan, moratorium yang berakhir 31 Desember 2017

ini akan diperpanjang. Dia ber alasan supaya tidak terjadi kekhawatiran, spekulasi moratorium diperpanjang atau tidak. Untuk Perwal perpanjangan, HS mengatakan tinggal menyelesaikan proses administrasi. "Jumat pagi. Bagian hukum sudah diminta membuat draft," jelasnya.

HS menjelaskan perpanjangan moratorium tersebut sudah berdasarkan hasil evaluasi dua kali perpanjangan sebelumnya. Mepurut dia perpanjangan bukan sekadar menahan izin tapi juga konsolidasi proses perizinan, fasad hotel hingga persaingan usaha, terkait dengan

perang tarif. "Silakan tanya PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) sudah sehat belum. Kalau sehat PHRI tidak minta perpanjangan," ujarnya.

Evaluasi yang dilakukan juga terkait dengan aspek transportasi tata ruang. Menurut dia selama ini hotel masih menumpuk di kawasan ring satu Malioboro. Supaya tidak hanya terpusat di sana, hotel yang berada di luar ring satu juga diminta menyediakan shuttle bus untuk mengangkut penumpang ke Malioboro. "Jadi tidak menumpuk di Malioboro dan tidak macet di jalan," ujarnya.



Haryadi Suyuti

Data di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja hingga saat ini masih

terdapat 17 izin pendirian hotel yang belum dikeluarkan. Tujuh belas izin hotel tersebut merupakan bagian dari 104 hotel yang mengajukan izin pendirian sebelum diberlakukan moratorium sejak 1 Januari 2014 lalu. "Tetap 17 tidak kurang tidak tambah," ujar Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Jogja Setiono kemarin (13/12).

Menurut Setiono, sebelumnya sudah ada hotel yang berkasnya lengkap tapi karena tidak benar, izin belum dikeluarkan. Kendalanya, lanjut dia, karena pengurusan analisa dampak lingkungan (Amdal) yang lama.

Untuk waktunya, 17 investor hotel tersebut tidak diberi batasan waktu termasuk tidak terkena moratorium. "Khusus 17 ini tidak dibatasi waktu karena sudah berinvestasi di Jogja, selama berkasnya lengkap dan benar izinya keluar dan bisa bangun," jelasnya.

Selama moratorium yang sudah diperpanjang dua kali ini, Setiono mengakui banyak investor yang berminat untuk membangun hotel baru di Kota Jogja. Tapi karena masih masuk dalam masa moratorium, pengajuan mereka langsung ditolak.

Moratorium izin mendirikan bangunan hotel di Kota Jogja sesuai dengan Perwal nomor 55 tahun 2016 tentang Perubahan Perwal nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Berdasarkan Perwal 77 tahun 2013 moratorium diberlakukan sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016, yang diperpanjang dengan Perwal nomor 55 tahun 2016 hingga 31 Desember 2017. Tapi sebelum Perwal 77 tahun 2013 berlaku, terdapat 104 pengajuan izin pendirian hotel, yang saat ini tinggal 17 yang belum keluar izinya. (pra/din/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005